

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2015



Bagian Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Kota Mojokerto

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2015 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto disusun dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Bagian Administrasi Pembangunan sebagai wujud pertanggungjawaban Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto sebagai unsur penyelenggara pemerintahan atas tugas pokok dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Bagian Administrasi Pembangunan berdasarkan perencanaan strategis (Renstra) yang ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kota Mojokerto di masa yang akan datang. Namun demikian masih adanya keterbatasan dalam memahami indikator capaian kinerja, analisis data dan sumber daya yang dimiliki, yang pada gilirannya pelaporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut. Semoga LKIP Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ini telah dapat mencerminkan kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto tahun 2015.

Mojokerto, Maret 2016

KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Drs. HERU SETYADI

Pembina Tk. I

NIP. 19640501 199203 1 011

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Bagian	2
Administrasi Pembangunan	
1.2.1. Struktur Organisasi	2
1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	6
2.1.1. Visi dan Misi	6
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	6
2.2. Perjanjian Kinerja.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2015.....	11
3.2. Analisis Capaian Kinerja	12
3.3. Realisasi Anggaran	16
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	18
4.2. Langkah di Masa Mendatang	18
 LAMPIRAN :	
Lampiran 1 Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2015	
Lampiran 2 Pengukuran Kinerja Tahun 2015	
Lampiran 3 Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian IKU dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015	
Lampiran 4 Capaian Kinerja Output Tahun 2015	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015.....	8
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2015.....	12
Tabel 3.2 Ringkasan Capaian Kinerja Th. 2014 dan 2015.....	13
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2015.....	16

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2015**



**Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
TAHUN 2016**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur yang berorientasi hasil sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang efektif dan murah dan birokrasi yang tidak berbelit-belit disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan). Sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance (pemerintahan yang baik). Agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, pengusaha (private sektor) dan masyarakat. Good governance yang baik adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggara kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas kelembagaan, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat .

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawab yang dilaksanakan secara periodik. Sejalan dengan hal tersebut diatas, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dan sebagai turunan dari produk hukum ini diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodek setiap akhir tahun .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berfungsi sebagai peran alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong good governance. Dalam perspektif yang lebih luas dan media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh SKPD Pemerintah Kota Mojokerto dan partisipasi masyarakat. LKIP Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2015 memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan serta perkembangan dalam upaya pencapaian atas sasaran strategis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto. Hasil analisis pencapaian kinerja menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan capaian hasil kerja dari setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Secara struktur organisasi Bagian Administrasi Pembangunan berada pada Pemerintah Kota Mojokerto, dibawah koordinasi Sekretariat Daerah Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 Tentang pembentukan Sekretariat Daerah kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah kota dan Staf ahli Kota Mojokerto.

1.2. Gambaran Umum Bagian Administrasi Pembangunan

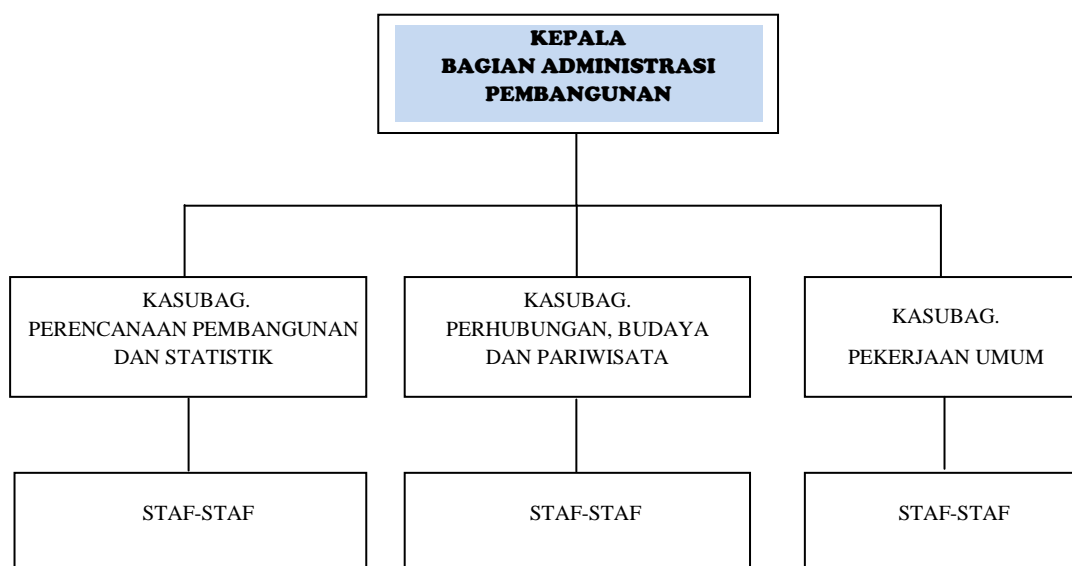
1.2.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Mojokerto, maka Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, terdiri dari:

- a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan dan Statistik;
- c. Sub Bagian Perhubungan, Budaya dan Pariwisata;
- d. Sub Bagian Pekerjaan Umum.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto



1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan pengendalian perkembangan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Fungsi

Bagian Administrasi pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan sarana perhubungan dan pekerjaan umum;

- b. Pelaksanaan, pengumpulan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan budaya dan pariwisata;
- c. Pengumpulan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik serta penanaman modal;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk kelancaran tugas di Bagian Administrasi Pembangunan terbagi menjadi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan dan Statistik;
- b. Sub Bagian Perhubungan, Budaya dan Pariwisata;
- c. Sub Bagian Pekerjaan Umum.

1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Umum

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota dan Staf Ahli Kota Mojokerto, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto mempunyai aspek strategis yaitu penyusunan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan dan pengembangan pariwisata.

Melihat dari tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat bahwa Bagian Administrasi Pembangunan merupakan unsur Staf yang tugasnya lebih bersifat administratif. Kesempurnaan mekanisme sistem perencanaan, penganggaran biaya, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan keinginan yang dicita-citakan. Adapun permasalahan utama dan isu strategis yang dihadapi Bagian Administrasi Pembangunan adalah :

- 1) Belum optimalnya koordinasi antar SKPD maupun lintas SKPD ;
- 2) Belum optimalnya administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan ;
- 3) Masih dinilai lambatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Mojokerto ;
- 4) Masih banyak terdapat lelang ulang dikarenakan lelang gagal

- 5) Keberadaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah kota sehingga pengelolaan realisasi APBD tidak sesuai dengan rencana ;
- 6) Penerapan sistem pengawasan melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah belum maksimal ;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis pembangunan Kota Mojokerto diimplementasikan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009–2014. RPJMD ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Mojokerto, baik Pemerintah Kota maupun masyarakat secara luas dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah dalam lima tahun sesuai dengan porsi dan peran masing-masing.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah kota Mojokerto mengimplementasikan rencana strategis tersebut dalam Visi dan Misi sebagai berikut :

2.1.1 Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stake holders*) yang ada di Kota Mojokerto. Visi Bagian Administrasi pembangunan tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, yaitu :

**“TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN
BERKEMBANGNYA PARIWISATA DI KOTA MOJOKERTO “**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi yaitu :

1. Mewujudkan pengembangan potensi pariwisata dengan meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat;
2. Mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu dengan mengacu kepada pernyataan Misi yang didasarkan pada isu-isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

serta untuk mengarahkan pada sasaran ,kebijakan ,program,kegiatan yang akan dilakukan dalam dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran (*objective*) pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan Misi-misi Bagian Administrasi Pembangunan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Misi I : Mewujudkan pengembangan potensi pariwisata dengan meningkatkan peran serta masyarakat
- Tujuan : Mengembangkan potensi pariwisata dan pemasaran pariwisata
- Sasaran : Meningkatnya jaringan promosi pariwisata dan kunjungan wisatawan
- Misi II : Mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- Tujuan : Meningkatkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- Sasaran : Meningkatnya tertib administrasi transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

2.2. Perjanjian Kinerja

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, maka penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur, dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain, adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan Kinerja pada Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2015 berpedoman pada indikator-indikator Kinerja yang ditetapkan dalam

Renstra Pembangunan 2014. Adapun penetapan kinerja Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Jaringan promosi pariwisata didalam dan diluar negeri	1. Persentase pelaksanaan promosi pariwisata dan pagelaran secara periodik yang dapat dilaksanakan 2. Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi terhadap potensi pariwisata 3. Ketersediaan buku promosi pariwisata yang tersedia 4. Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya 5. Persentase Fasilitasi/pengiriman duta wisata, seniman, sastrawan, budayawan dan pelaku pariwisata yang dapat dilaksanakan	100% (22 keg.) 100% (3 keg.) 100% (1 Buku) 100% (1 keg.) 100 % (24 Kali)
2.	Meningkatnya tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	1. Ketersediaan Buku Analisa Standar Belanja 2. Ketersediaan Buku Standar Satuan Harga 3. Persentase proses pengadaan b/j yang diselesaikan oleh ULP 4. Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Th. 2016 5. Persentase SKPD yang mengirim dokumen laporan hasil monitoring dan pelaporan kegiatan SKPD dengan tepat waktu	1 Buku 2 Buku 80% (112 paket) 1 Buku 100 % (58 SKPD)

Program	Anggaran
1 Kegiatan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar negeri	Rp 1.151.602.500
2 Kegiatan Pelatihan Pemendu Wisata Terpadu	Rp 295.028.650
3 Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	Rp 84.810.400
4 Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya	Rp 42.221.400
5 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Rp 494.798.250
6 Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja	Rp 265.356.800
7 Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	Rp 464.851.050
8 Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah (ULP)	Rp 156.450.250
9 Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 155.377.000
10 Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 83.327.200
11 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)	Rp 125.659.400
12 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 109.370.600

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja (Tapkin)
Bagian Administrasi Pembangunan
Tahun 2015

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN			TARGET
1	Meningkatnya jaringan promosi pariwisata dan kunjungan wisatawan		
	1.1	Persentase pelaksanaan promosi pariwisata didalam dan diluar negeri	100 %
	1.2	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi terhadap potensi pariwisata	100 %
	1.3	Ketersediaan buku promosi pariwisata	100 %
	1.4	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	100 %
	1.5	Persentase pelaksanaan fasilitasi pengiriman Duta Wisata Daerah, seniman, sastrawan, budayawan dan pelaku usaha pariwisata	100 %
2	Meningkatnya tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan		
	2.1	Ketersediaan Buku HSPK Th. 2016	1 buku
	2.2	Ketersediaan Buku SHSB dan SHSBGN TH. 2016	2 buku
	2.3	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP	80 %
	2.4	Ketersediaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Th. 2016	1 buku
	2.5	Persentase SKPD yang melaporkan pelaksanaan dan penyerahan hasil kegiatan yang tepat waktu	100 %

Untuk mencapai target sasaran tersebut, didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan anggaran sebesar Rp. 1.446.631.150,-
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri
 - b. Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
2. Program Pengembangan Kemitraan, dengan anggaran Rp. 621.830.050,-
 - a. Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
 - b. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
 - c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Peendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan anggaran Rp. 109.370.600,-
 - a. Kegiatan Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan anggaran Rp. 1.251.021.700,-
 - b. Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja
 - c. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga
 - d. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah (ULP)
 - e. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - f. Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - g. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pengukuran capaian kinerja tahun 2015 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian indikator kinerja utama (IKU).

Laporan kinerja Bagian Administrasi Pembangunan ini ditujukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu laporan ini dimaksudkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bagian Administrasi Pembangunan untuk meningkatkan kinerjanya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan. Media pengukuran kinerja terdiri dari Formulir Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran/program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, yaitu :

81 % – 100% = Baik

80 %- 50% = Cukup

Dibawah 50 = Kurang

Secara ringkas, capaian kinerja tahun 2015 pada Bagian Administrasi Pembangunan dapat disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2015

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN SASARAN
1	Meningkatnya tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan				
1.1	Ketersediaan Buku HSPK , Buku SHSB, Buku SHSBGN, Buku Juknis Th. 2015	4 buku	4 buku	100%	Baik
1.2	Persentase proses pengadaan barang/jasa yang diselesaikan oleh ULP	112 paket	90 paket	80,36%	Baik
1.3	Persentase SKPD yang mengikuti Sosialisasi RUP dan Perpres No.4 2015	58 SKPD	55 SKPD	94,83%	Baik
1.4	Persentase SKPD yang mengisi laporan evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran pd aplikasi TEPPA dengan tepat waktu	58 SKPD	48 SKPD	82,76 %	Baik
1.5	Persentase SKPD yang mengirim laporan hasil monitoring dan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dengan tepat waktu	58 SKPD	50 SKPD	86,21 %	Baik

Berdasarkan capaian diatas, tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian Administrasi dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) sasaran strategis rata-rata Katagori “BAIK”.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap indikator sasaran lainnya yang

mendukung capaian kinerja sasaran dan berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.

Perbandingan Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2014 dan 2015 secara ringkas disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2014 dan 2015

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2014			TAHUN 2015		
		TARGET	REALI SASI	CAPAIAN	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan						
1.1	Jumlah Buku HSPK, SSH, SHSBGN dan Juknis Th. 2016 yang disusun dengan benar dan tepat waktu	1 keg	1 keg	100%	1 keg	1 keg	100%
1.2	Persentase proses pengadaan b/j yang diselesaikan oleh ULP	85	76	89,41 %	112	90	80,36 %
1.3	Persentase SKPD yang mengisi laporan evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran pada aplikasi TEPPA dengan tepat waktu	58 SKPD	58 SKPD	100%	58 SKPD	48 SKPD	82,76 %
1.4	Persentase SKPD yang mengirim laporan hasil monitoring dan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dengan tepat waktu	58 SKPD	58 SKPD	100%	58 SKPD	50 SKPD	86,21 %

Selaras dengan uraian pada tabel tersebut diatas, maka sebagai langkah untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan misi organisasi khususnya Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto adalah melalui analisa capaian kerjaan.

Adapun hasil analisa capaian kerja pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Capaian kinerja kegiatan penyusunan Buku SSH, HSPK, ASB dan Buku Petunjuk Teknis tahun 2016 capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100%, dan jika dibandingkan tahun 2014 capaian kinerja indikator ini relatif sama yaitu 100% sehingga dapat dikatakan capaian kinerja pada indikator ini dinyatakan berhasil. Hal ini dikarenakan penyusunan untuk masing-masing buku dapat selesai tepat waktu. Buku-buku pedoman pengelolaan keuangan daerah tersebut masing-masing digandakan menjadi 100 buku dan dikirim ke seluruh SKPD di Kota Mojokerto. Penyusunan Buku-buku pengendali kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah pada SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
2. Capaian Indikator kegiatan penyusunan sistem informasi keuangan daerah yaitu pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP pada tahun 2014 adalah 89,41%, tahun 2015 capaian kinerjanya menurun menjadi 80,36%. Capaian kinerja ini dihitung dari Jumlah proses pengadaan barang/jasa yang diselesaikan oleh ULP (90 paket) dibagi dengan Jumlah pengadaan barang /jasa yang diproses oleh ULP (112 paket) dikalikan 100%. Secara realita sebenarnya target pelaksanaan barang/jasa pada tahun ini lebih berhasil dibanding dari tahun lalu, terbukti jumlah paket pekerjaan yang diajukan ke Bagian Administrasi Pembangunan untuk dilaksanakan melalui lelang ULP lebih banyak, yaitu 112 paket dan yang selesai lelang mencapai 90 paket pekerjaan, gagal lelang 8 paket dan 14 paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Ada beberapa hal yang menyebabkan gagal lelang, antara lain karena pelaksanaan proses lelang terkendala aturan hibah, lahan untuk pelaksanaan lelang dalam prose penghapusan atau bahkan lahannya tidak mencukupi. 14 paket pekerjaan juga tidak dapat dilaksanakan karena kajian teknis tidak memenuhi syarat untuk dikerjakan atau karena waktu untuk

pengulangan lelang gagal yang tidak mencukupi. Realisasi anggaran untuk operasional ULP TA. 2015 hanya 52,16% atau hanya separo dari anggaran yang ada, hal ini dikarenakan ada salah satu kegiatan yaitu Asistensi/Pendampingan untuk ULP Kota Mojokerto tidak dilakukan sehingga belanja jasa tenaga ahli/instruktur tidak terserap. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 81.611.140,- atau 52,16% dari dana yang dianggarkan yaitu Rp. 156.450.250,-

3. RUP adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). RUP adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh K/L/D/I dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I (co-financing), baik yang Lelang maupun Tidak Lelang (Swakelola/Pengadaan/Penunjukan Langsung). Sebagai upaya untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di pemerintah Kota Mojokerto pada setiap Tahun Anggaran dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dirasa perlu mengadakan Sosialisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Aplikasi TEPPA adalah sistem aplikasi yang digunakan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan monitoring evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran pembangunan yang bersumber dari dana APBD, yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Maksud Aplikasi TEPPA, untuk mengembangkan Aplikasi Online Sistem Monitoring dan evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran APBD yang digunakan oleh Pemerintah. Capaian kinerja kegiatan TEPPA th. 2015 ini adalah 82,76 % karena dari total 58 SKPD, 48 SKPD mengisi aplikasi dengan tepat waktu. Kegiatan evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran (TEPPA) pada tahun 2015 ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 101.777.000,- atau sekitar 80,99% dari dana yang dianggarkan yaitu Rp. 125.659.400,-. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, realisasi anggaran pada tahun 2015 ini mengalami kenaikan, namun demikian anggaran dana untuk operasional TEPPA pada tahun 2015 ini tidak dapat terserap maksimal dikarenakan di tahun 2015 tidak ada undangan kegiatan evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran (TEPPA) luar daerah sehingga anggaran SPPD luar daerah tidak terserap.

Formula Indikator kegiatan ini adalah Jumlah SKPD yang mengisi laporan evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran pada aplikasi TEPPA dengan tepat waktu dibagi dengan Jumlah keseluruhan SKPD dikali 100%.

4. Salah satu bentuk kualitas perencanaan yang baik adalah tingkat pelaksanaan penugasan berupa penyusunan laporan yang tepat waktu sesuai dengan rencana. Hasil capaian kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dievaluasi dan dimonitor berdasarkan dari hasil monitoring dan laporan kegiatan SKPD bulanan yang dikirimkan ke Bagian Administrasi Pembangunan. Capaian kinerja kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH tahun 2015 adalah 86,21% hasil ini diperoleh dari jumlah SKPD yang mengirim laporan dengan tepat waktu sebanyak 50 SKPD dibagi jumlah total SKPD yaitu 58 SKPD dikali 100%. Masih ada beberapa SKPD yang harus diingatkan atau dihubungi oleh Bagian Administrasi Pembangunan untuk mengirim laporan sebelum batas akhir. Pengiriman laporan kegiatan SKPD ke Bagian Administrasi Pembangunan adalah setiap bulan maksimal tanggal 10, sehingga sebelum tanggal 15 Bagian Adm. Pembangunan bisa merekap untuk dijadikan bahan evaluasi oleh Walikota Mojokerto dan juga untuk dikirim ke tingkat propinsi. Kedepannya diharapkan kesadaran dari tiap SKPD untuk mengirim laporan kegiatan bulanan secara rutin dan tepat waktu. Kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH tahun 2015 menggunakan anggaran sebesar Rp. 96.384.400,- atau 88,13% dari pagu anggaran yang ada yaitu Rp. 109.370.600,-.

3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dapat digambarkan dalam table berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Tahun 2015

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	%
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.251.021.700,-		
	a. Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja	265.356.800	258.989.450,-	97,60

	b. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	464.851.050,-	462.696.950,-	99,54
	c. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah (ULP)	156.450.250	81.611.140,-	52,16
	d. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Penyusunan Juknis)	155.377.000,-	154.562.200,-	99,48
	e. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	83.327.200,-	68.287.000,-	81,95
	f. Monitoring evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA)	125.659.400,-	101.777.000,-	80,99
2.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Rp. 109.370.600,-	109.370.600,-		
	a. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	109.370.600,-	96.384.400,-	88,13

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana telah disampaikan dalam paparan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2016 oleh Walikota Mojokerto bahwa Bagian Administrasi Pembangunan merupakan salah satu SKPD penanggung jawab dari program unggulan yang merupakan sasaran prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 yaitu pada prioritas ke 2 : Menyediakan Produk, Jasa dan Layanan yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi dengan sasaran meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah yang dituangkan dalam program unggulan transparansi progres kegiatan.

Berorientasi pada uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka mengenai keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan strategi pemecahan masalah dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

4.1 Kesimpulan

Dari data pada LKIP Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa secara umum Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan baik. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2015 pada hakekatnya karena berkat limpahan rahmat dan karunia Allah SWT dan hasil kerjasama yang baik dari semua SKPD di pemerintah Kota Mojokerto. Secara umum dapat dikemukakan bahwa Misi organisasi yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan sebagian besar telah berhasil karena kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan khususnya tujuan dan sasarannya.

4.2 Langkah di Masa Mendatang

Untuk meningkatkan kinerja organisasi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setiap program dan kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan schedule yang tercantum pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan di awal-awal tahun anggaran sehingga dapat diselesaikan tepat waktu
2. Mempertajam tujuan penerapan aplikasi TEPPA agar realisasi anggaran setiap bulan pada tahun berjalan bisa segera diketahui dan dievaluasi sehingga pengawasan penyerapan anggaran SKPD setiap bulan dapat

dilakukan. Dengan TEPPA bisa meningkatkan disiplin serta percepatan dan pengendalian realisasi APBD Kota Mojokerto.

3. Keberadaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Mojokerto dapat dimaksimalkan dalam pengelolaan realisasi APBD agar sesuai dengan rencana.
4. Mengadakan Bimtek/Sosialisasi layanan pengadaan secara elektronik
5. Melakukan pendampingan/asistensi anggota ULP pada pelaksanaan pengadaan secara elektronik dengan mengundang Tenaga Ahli/Narasumber.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Administarsi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2015 telah kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan koreksi guna penyempurnaan laporan yang akan datang.

Mojokerto, Maret 2016
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

Drs. HERU SETYADI
Pembina Tk. I
NIP. 19640501 199203 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

VISI : Terwujudnya tertib administrasi pembangunan dan berkembangnya pariwisata di Kota Mojokerto

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	
MISI 1 : Mewujudkan pengembangan potensi pariwisata dengan meningkatkan peran serta masyarakat						
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya jaringan promosi pariwisata didalam dan diluar		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		1.1	Persentase pelaksanaan promosi pariwisata didalam dan diluar	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar negeri	1.151.602.500	95%
		1.2	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan fasilitas terhadap potensi pariwisata	Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	295.028.650	100%
		1.3	Ketersediaan buku promosi	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan	84.810.400	100%
		1.4	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya	42.221.400	100%
		1.5	Persentase pelaksanaan fasilitasi pengiriman Duta Wisata Daerah, seniman, sastrawan, budayawan dan pelaku usaha pariwisata	Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	494.798.250	95%
MISI 2 : Mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan						
2	Sasaran Strategis : Meningkatnya tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
		1.1	Persentase Ketersediaan Buku HSPK 2016	Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja	265.356.800	100%
		1.2	Persentase Ketersediaan Buku SHSB dan SHSBGN Tahun 2016	Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	464.851.050	100%
		1.3	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah (ULP)	156.450.250	85%
		1.4	Persentase Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Th. 2016	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	155.377.000	100%
		1.5	Persentase SKPD yang melaporkan pelaksanaan dan penyerahan hasil kegiatan yang tepat waktu	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)	125.659.400	100%

	Kegiatan		Anggaran
1	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar negeri	Rp.	1.151.602.500
2	Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	Rp.	295.028.650
3	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	Rp.	84.810.400
4	Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya	Rp.	42.221.400
5	Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Rp.	494.798.250
6	Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja	Rp.	265.356.800
7	Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	Rp.	464.851.050
8	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah (ULP)	Rp.	156.450.250
9	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan	Rp.	155.377.000
10	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)	Rp.	125.659.400

Sekretaris Daerah Kota Mojokerto

MAS AGOES NIRBITO M.W, M.Si
NIP. 19570917 198309 1 001

Mojokerto, Pebruari 2015
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

WIWIET FEBRYANTO, ST., MM
NIP. 19690217 199202 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya jaringan promosi pariwisata didalam dan diluar negeri	1.1	Persentase pelaksanaan promosi pariwisata didalam dan diluar negeri	19 kegiatan
		1.2	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi terhadap potensi pariwisata	3 kegiatan
		1.3	Ketersediaan buku promosi	1 buku
		1.4	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	1 kegiatan
		1.5	Persentase pelaksanaan fasilitasi pengiriman Duta Wisata Daerah, seniman, sastrawan, budayawan dan pelaku usaha pariwisata	20 kegiatan
2	Meningkatnya tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	1.1	Ketersediaan Buku HSPK 2016	1 buku
		1.2	Ketersediaan Buku SHSB dan SHSBGN Tahun 2016	1 buku
		1.3	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP	113 kegiatan
		1.4	Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Th. 2016	1 buku
		1.5	Persentase SKPD yang melaporkan pelaksanaan dan penyerahan hasil kegiatan yang tepat waktu	34 SKPD

Kegiatan		Anggaran
1	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar negeri	Rp. 1.151.602.500
2	Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	Rp. 295.028.650
3	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	Rp. 84.810.400
4	Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya	Rp. 42.221.400
5	Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Rp. 494.798.250
6	Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja	Rp. 265.356.800
7	Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	Rp. 464.851.050
8	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah (ULP)	Rp. 156.450.250
9	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 155.377.000
10	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)	Rp. 125.659.400

Sekretaris Daerah Kota Mojokerto

Mojokerto, Pebruari 2015
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

MAS AGOES NIRBITO M.W, M.Si
NIP. 19570917 198309 1 001

WIWIET FEBRYANTO, ST., MM
NIP. 19690217 199202 1 001

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KOTA MOJOKERTO
PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2015

Sasaran Strategis		Satuan	Target	Program/Kegiatan	Anggaran Rp	
Uraian	Indikator Kinerja					
MISI 1 : Mewujudkan pengembangan potensi pariwisata dengan meningkatkan peran serta masyarakat						
1	Sasaran :			1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
	Meningkatnya jaringan promosi pariwisata didalam dan diluar negeri	1.1 Jumlah kegiatan promosi pariwisata didalam dan diluar negeri yang terlaksana	kegiatan	22	- Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar negeri	1.151.602.500
		1.2 Jumlah kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi terhadap potensi pariwisata yang terlaksana	kegiatan	3	- Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	295.028.650
		1.3 Ketersediaan buku promosi pariwisata	buku	1	- Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	84.810.400
		1.4 Jumlah kegiatan fasilitasi forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya yang terlaksana	kegiatan	1	- Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya	42.221.400
		1.5 Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengiriman Duta Wisata Daerah, seniman, sastrawan, budayawan dan pelaku usaha pariwisata yang terlaksana	kegiatan	24	- Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	494.798.250
MISI 2 : Mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan						
1	Sasaran :			2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Meningkatnya tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	1.1 Ketersediaan Buku HSPK 2016	buku	1	- Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja	265.356.800
		1.2 Ketersediaan Buku SHSB dan SHSBGN Tahun 2016	buku	1	- Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	464.851.050
		1.3 Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP	%	80	- Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah (ULP)	156.450.250

Sasaran Strategis			Satuan	Target	Program/Kegiatan	Anggaran Rp
Uraian	Indikator Kinerja					
	1.4	Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Th. 2015	buku	1	- Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	155.377.000
	1.5	Persentase SKPD yang melaporkan pelaksanaan dan penyerahan hasil kegiatan yang tepat waktu	%	80	- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)	125.659.400

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KOTA MOJOKERTO
PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2015

VISI : Terwujudnya tertib administrasi pembangunan dan berkembangnya pariwisata di Kota Mojokerto

MISI - 1 : Mewujudkan pengembangan potensi pariwisata dengan meningkatkan peran serta masyarakat

TUJUAN - 1 : Mengembangkan potensi pariwisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2014			TAHUN 2015			Capaian 2014 dibandingkan Capaian 2015	Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
(1)		(2)	(3)	(4)=(3/2X100)	(5)	(6)	(7)=(6/5X100)	(8)=(7/4)	(9)
1	Sasaran 1 . Meningkatkan jaringan promosi pariwisata dan kunjungan wisata								
	1.1 Indikator 1 . Jumlah kegiatan promosi pariwisata didalam dan diluar negeri yang terlaksana	22,00	21,00	95,45%	22,00	14,00	63,64%	66,67%	
	1.2 Indikator 2.Jumlah kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi thd potensi pariwisata yang terlaksana	3,00	3,00	100,00%	3,00	3,00	100,00%	100,00%	
	1.3 Indikator 3. Ketersediaan buku promosi pariwisata	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00%	
	1.4 Indikator 4.Jumlah kegiatan fasilitasi forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya yang terlaksana	1,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	0,00%	
	1.5 Indikator 5.Jumlah kegiatan fasilitasi pengiriman Duta Wisata Daerah, seniman, sastrawan, budayawan dan pelaku usaha pariwisata yang terlaksana	20,00	25	125,00%	24,00	17	70,83%	56,67%	

**PERKEMBANGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN IKU DARI TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		Program	
				2014	2015	2014	2015	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya jaringan promosi pariwisata dan kunjungan wisata	1	Persentase pelaksanaan promosi pariwisata didalam dan diluar negeri	%	18,00	22,00	18,00	17,00	100,00	77,27	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		2	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi terhadap potensi pariwisata	%	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	
		3	Ketersediaan buku promosi pariwisata	buku	1,00	1,00	1,00	-	100,00	-	Program Pengembangan Kemitraan
		4	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	%	1,00	1,00	1,00	-	100,00	-	
		5	Persentase pelaksanaan fasilitasi pengiriman Duta Wisata Daerah, seniman, sastrawan, budayawan dan pelaku usaha pariwisata	%	20,00	24,00	25,00	17,00	125,00	70,83	
2	Meningkatnya tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	Ketersediaan Buku HSPK 2015	buku	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		2	Ketersediaan Buku SHSB dan SHSBGN 2015	buku	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
		3	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP	%	85,00	112,00	76,00	90,00	89,41	80,36	
		4	Ketersediaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Th. 2015	buku	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
		5	Persentase SKPD yang mengikuti Sosialisasi RUP dan Perpres No. 4 Th.2015	%	-	58,00	-	55,00	-	94,83	
		6	Persentase SKPD yang mengisi laporan evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran pd aplikasi TEPPA dg tepat waktu	%	58,00	58,00	58,00	58,00	100,00	100,00	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		Program	
				2014	2015	2014	2015	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		7	Persentase SKPD yang mengirim laporan hasil monitoring dan laporan pelaksanaan kegiatan dg tepat waktu	%	58,00	58,00	58,00	58,00	100,00	100,00	

Petunjuk Pengisian:

- Kolom 1 : Nomor Urut
Kolom 2 : Sasaran Strategis yang terkait dengan Unit Kerja
Kolom 3 : Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait Unit Kerja
Kolom 4 : Satuan IKU
Kolom 5 - 9 : Target IKU 2013 s.d 2014
Kolom 10 - 14 : Realisasi IKU 2013 s.d 2014
Kolom 15 - 19 : Capaian IKU 2013 s.d 2014
Kolom 20 : Program Bag. Adm.Pembangunan sesuai RKA

